

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING
YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI KALIMANTAN
BARAT DITINJAU DARI PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN**

LUFHIE, SH

A.21211004

ABSTRACT

This study aims to determine : 1) disclose and analyze barriers to enforcement against foreign fishermen fishing in the territorial waters of West Kalimantan ZEEI , 2) disclose and analyze the policy pursued enforcement against foreign fishermen convicted criminal and that no corporal punishment do not run away . The research was conducted in Pontianak include Court Judge at the District Court Pontianak Fishery , Marine Resource Trustees and Fisheries (PSDKP) Pontianak , West Kalimantan Directorate of Water Police and the Indonesian National Army Navy (TNI - AL) Pontianak . Data collection methods used were interviews , questionnaires , and direct observations . The data obtained in qualitative analysis . The results showed that the type of fishing (illegal fishing) which conducted foreign fishermen in West Kalimantan is a form of incompleteness ZEEI licensing documents (original , SIPI , and fishing ground) , violation of gear use area , and do not activate communication devices (transmitter) . From the results patrol SPSDKP Pontianak , the number of foreign ships that captured illegal fishing activities in 2011 to 2012 as many as 55 vessels , consisting of 55 skippers and crew as much as 424 people . Of the cases ZEEI fishing in West Kalimantan was transferred to the Court of Fisheries at the District Court of Pontianak , the authors took a sample 7 decision , the verdict of the 4 countries of origin of foreign fishermen and 3 decision against Vietnamese fishermen from Thailand . The second decision of the ad hoc judges , proved that there is a difference penalty of foreign fishermen fishing in ZEEI , where to fishermen from Thailand country already has a MoU with Indonesian fishermen from the state instead of Vietnam have MoU yet . Thus law enforcement against foreign fishermen associated with the implementation of Article 102 of Law No. 45 Year 2009 on amendments to the Law No. 31 of 2004 on Fisheries greatly weaken the law enforcement process even in the long term Indonesian state will experience a greater loss . The absence of the MoU in the field of fisheries has become the modus operandi in fishing , even less foreign and foreign-flagged vessels using child labor or crew (ABK) from Indonesia . When the arrest and deportation , security forces of confusion , with the deportation process itself. In an effort to address the conduct of law enforcement foreigners engaging in fishing activities in West Kalimantan ZEEI , then the government should formulate policies related to the implementation of Article 102 which undermine law enforcement process .

Keywords : *Law enforcement policies against foreign fishermen convicted criminal and not corporal punishment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) mengungkapkan dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wilayah perairan Kalimantan Barat, 2) mengungkapkan dan menganalisis kebijakan yang dilakukan penegak hukum terhadap nelayan asing yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman badan agar tidak melarikan diri. Penelitian ini dilakukan di Pontianak meliputi Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Direktorat Kepolisian Perairan Kalimantan Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Pontianak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan nelayan asing di ZEEI Kalbar adalah berupa ketidaklengkapan dokumen perizinan (SIUP, SIPI, dan *fishing ground*), pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, dan tidak mengaktifkan alat komunikasi (*transmitter*). Dari hasil patroli SPSDKP Pontianak, jumlah kapal asing yang ditangkap melakukan kegiatan *illegal fishing* pada tahun 2011 sampai 2012 sebanyak 55 kapal, terdiri dari 55 nakhoda dan ABK sebanyak 424 orang. Dari kasus-kasus penangkapan ikan di ZEEI Kalbar yang dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, penulis mengambil 7 sampel putusan, yaitu 4 putusan terhadap nelayan asing asal negara Vietnam dan 3 putusan terhadap nelayan asal Thailand. Dari kedua putusan hakim ad hoc tersebut, terbukti bahwa terdapat perbedaan sanksi hukuman bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI, di mana untuk nelayan asal negara Thailand sudah mempunyai MoU dengan Indonesia sebaliknya untuk nelayan asal negara Vietnam belum memiliki MoU. Dengan demikian penegakan hukum terhadap nelayan asing terkait dengan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat melemahkan proses penegakan hukum bahkan dalam jangka panjang negara Indonesia akan mengalami kerugian yang lebih besar. Belum adanya MoU di bidang perikanan ini menjadi modus operandi dalam penangkapan ikan, bahkan tidak jarang kapal asing dan berbendera asing menggunakan tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. Ketika dilakukan penangkapan dan deportasi, aparat keamanan kebingungan, dengan proses deportasi itu sendiri. Dalam upaya melakukan penegakan hukum untuk mengatasi Warga Negara Asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI Kalimantan Barat, maka pemerintah harus memformulasikan kebijakan terkait penerapan Pasal 102 yang melemahkan proses penegakan hukum.

Kata Kunci : Kebijakan penegak hukum terhadap nelayan asing yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman badan

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan berbagai instansi dan aparat penegak hukum tersebut memerlukan kejelasan dan ketegasan tentang tugas dan peranan masing-masing instansi agar tidak terjadi kerancuan yang dapat mengakibatkan tidak lancarnya upaya penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

Dengan diberlakukannya UNCLOS 1982 sebagai hukum positif secara internasional pada tanggal 16 November 1994 maka Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan (*Arhipelagic State*), dengan luas keseluruhan sekitar 7,7 Juta Km². Lautan merupakan bagian terbesar yakni 5,8 juta Km² atau lebih kurang 75%, sedangkan sisanya seluas 1,9 juta Km² merupakan daratan. Konvensi itu kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Laut merupakan entitas yang sangat penting bagi keberadaan Indonesia masa kini maupun masa datang, karena laut merupakan *raison d'être* (alasan keberadaan) Negara ini sebagai sebuah Negara kepulauan.¹

Salah satu potensi perikanan yang banyak diincar oleh para nelayan di dalam dan di luar negeri adalah perairan Kalimantan Barat, karena daerah tersebut terdapat banyak pulau dan teluk serta berdekatan dengan laut Cina Selatan yang merupakan salah satu laut terdalam di dunia. Daerah ini menyimpan kehidupan beragam ikan yang sangat besar. Kekayaan ini bukan hanya telah menghidupi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Kalimantan Barat saja, tetapi telah menambah pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.

Perairan Kalimantan Barat termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut Cina Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, kakap, tenggiri dan cumi-cumi. Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km, meliputi 2.004.000 hektar perairan umum, 26.700 hektar perairan budi daya tambak dan 15.500 hektar laut.²

¹ Naskah Akademik Keamanan Nasional Indonesia Aspek Maritime, Mabesal, Jakarta, 2006. Hal. 3

² <http://dyahutami.blogdetik.com/> diunduh tanggal 6 Maret 2013

Berkaitan dengan aktivitas pencurian ikan tersebut, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Meskipun sebagian pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 masih diberlakukan. Perubahan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan dan dapat memberikan kejelasan dan kepastian atas segala tindak pidana dan untuk mendorong percepatan dinamika pembangunan yang menganut azas pengelolaan perikanan bertanggung jawab.

Bahkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ditegaskan bahwa : “Dengan Undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindak pidana di bidang perikanan”. Hal ini merupakan indikator keseriusan pemerintah menangani pelanggaran perikanan dan menuntut kesiapan penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat POLRI berkoordinasi lebih intens lagi menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di bidang perikanan terutama di wilayah ZEEI yang banyak dilakukan oleh nelayan asing masih mengalami persoalan yang cukup krusial. Persoalan ini berkaitan dengan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di mana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa : “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah perikanan RI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan”. Jika seorang tersangka Warga Negara Asing (WNA) ditangkap, namun negara Indonesia belum mempunyai perjanjian dengan negara dari mana WNA tersebut berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan untuk proses penyidikan. Kemudian apakah saat proses

penyidikan dan persidangan aparat penegak hukum dapat menahan/tidak. Jika tersangka tersebut melarikan diri, maka siapa yang akan membayar dendanya.

2. Metodologi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sasaran atau locus penelitian adalah Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Direktorat Kepolisian Perairan Kalimantan Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Pontianak.

b. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian digunakan metode sampel bertujuan (*purposive sample*). Pemanfaatan metode *purposive sample* ini didasarkan pada pradigma alamiah (*naturalistik*) yang meletakkan “peran manusia” sebagai informan kunci dalam memperoleh akurasi data. Berdasarkan langkah-langkah metode *purposive sampel*, maka pilihan terhadap subyek penelitian terdiri dari :

- 1) Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak.
- 2) Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak.
- 3) Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kalimantan Barat dan
- 4) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Pontianak.
- 5) Nelayan asing yang dipersangkakan melakukan tindak pidana bidang perikanan dan divonis pidana tanpa hukuman kurungan (badan).

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui dari responden secara mendalam serta responden sedikit.³

2) Pengamatan (Observation)

Pengamatan (observasi) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian ini bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.⁴

3) Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung di tempat kejadian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan, photo-photo, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.⁵

d. Analisis Data

Data-data dianalisis secara kualitatif, dari hasil analisis kualitatif ini akan dapat diketahui persepsi para responden terhadap instrumen-instrumen dalam masing-masing variabel. Disamping penyebaran kuesioner kepada responden, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada responden. Jawaban-jawaban responden kemudian diolah.

3. MASALAH

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI Kalimantan Barat yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman badan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ?
- b. Bagaimana kebijakan penegak hukum dalam mengatasi Warga Negara Asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI Kalimantan Barat

³ Ibid, hal. 102

⁴ Ibid, hal. 105

⁵ Ibid, hal. 105

yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman badan agar tersangka tidak melarikan diri ?

4. PEMBAHASAN

A. Hasil Observasi

1. Proses Penanganan Hukum Tindak Pidana Perikanan

Hasil penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) Pontianak dan Kepolisian Perairan Kalimantan Barat akan diproses untuk mendapatkan bukti yang cukup. Proses berupa pemeriksaan dokumen surat izin dari pemerintah Indonesia, alat tangkap yang digunakan, hasil tangkapan ikan didapat, serta alat komunikasi.

Setelah di proses oleh instansi yang menangkap, kapal asing akan di Ad Hoc dan dikawal menuju pangkalan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kepolisian Perairan Polda Kalbar kepada nahkoda dan anak buah kapal (ABK) untuk dimintai keterangan.

Adapun pertimbangan yang meringankan terdakwa dengan mengajukan pembelaan secara lisan adalah terdakwa agar hukuman diringankan karena masih memiliki tanggungan keluarga (isteri dan anak) dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan selalu memperhatikan wilayah perbatasan perairan yang menjadi haknya untuk menangkap ikan. Kasus *illegal fishing* di kawasan ZEEI perairan Kalbar terjadi karena kurangnya pengawasan di daerah perairan Kalbar, kurangnya sarana (kapal patroli, dan alat komunikasi), dan prasarana (pos pengawasan, kendaraan transportasi), kurangnya kapal patroli pengawasan dilihat dari luas perairan Kalbar tidak sebanding, dan kurangnya dana dari pemerintah agar kapal patroli selalu intensif untuk mengawas di perairan Kalbar.

2. Identifikasi Kapal dan Jumlah Pelanggaran *Illegal Fishing* di ZEEI Perairan Kalbar

Pengamatan data tahun 2011 menunjukkan kasus *illegal fishing* berjumlah 23 pelanggaran dengan 23 nakhoda dan 164 ABK. Pelanggaran kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEEI perairan Kalbar sebagian besar terjadi di sekitar wilayah Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dan 1 kasus di Laut Natuna.

Pencegatan kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dilakukan dengan mengenali bentuk fisik dari bendera kapal yang merupakan ciri asal negara (perusahaan penangkapan ikan). Kapal-kapal asing yang ditangkap oleh SPSDKP Pontianak dan Kepolisian Perairan Polda Kalbar berasal dari Taiwan, Vietnam dan Thailand. Dari hasil pengamatan, asal perusahaan yang paling banyak melanggar yaitu berasal dari negara Vietnam sebanyak 19 kapal dan negara Thailand sebanyak 1 kapal dan Taiwan sebanyak 3 kapal.

Pengamatan data tahun 2012 menunjukkan kasus *illegal fishing* berjumlah 32 pelanggaran dengan 32 nakhoda dan 260 ABK. Pelanggaran kegiatan *illegal fishing* di wilayah ZEEI perairan Kalbar tidak berbeda dengan tahun 2011, yaitu terjadi di sekitar wilayah Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dan di Laut Natuna, termasuk pemilik dan nakhoda kapal. Dari data tersebut, membuktikan bahwa sanksi hukuman yang diterapkan kepada pelaku (nelayan asing) belum memberikan efek jera.

Praktek *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing merupakan permasalahan yang sangat kompleks bagi dunia perikanan tangkap Indonesia. Penangkapan kapal terhadap kasus *illegal fishing* di ZEEI perairan Kalbar terjadi oleh karena :

- 1) Ketidaklengkapan dokumen perizinan.
- 2) Pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap.
- 3) Tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi.

B. Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ikan di ZEEI Kalbar

1. Fakta Putusan Hakim Perikanan Pada Pengadilan Negeri Pontianak

Hasil penelitian ditemukan fakta dalam 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2011 dalam persidangan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan 3 (tiga) putusan kemudian pada tahun 2012 dengan terdakwa Warga Negara Thailand.

Dalam 4 (empat) putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam, terungkap dari hasil penelitian bahwa musyawarah Majelis Hakim mencapai hasil pemufakatan bulat tanpa ada perbedaan pendapat antara Majelis Hakim. Dalam putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, mengingat Negara Republik Indonesia belum melakukan perjanjian bilateral dengan Negara Vietnam dan konsekuensi hukum atas diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 yang dijelaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* tentang hukum laut, dengan tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian bilateral sebaliknya antara negara-negara bersangkutan. Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap semua putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dan pidana perampasan yang dijelaskan pada Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand yaitu Pidana denda sebesar Rp. 400.000.00,- (*empat ratus juta rupiah*) dan pidana perampasan atas uang hasil lelang kapal penangkap ikan yang dijelaskan pada Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

2. Dasar Petimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Di Wilayah ZEEI Kalbar

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - 2) Keterangan Saksi
 - 3) Keterangan ahli
 - 4) Keterangan terdakwa
 - 5) Barang Bukti
3. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* tentang hukum laut

Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya terhadap 7 (tujuh) putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2011 dan 2012 dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan Thailand mempertimbangkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law*

of the Sea 1982 tentang hukum laut. Peniadaan pidana penjara yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak berarti pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Pelaku tindak pidana perikanan dilakukan Warga Negara Asing (WNA) tetap dinyatakan bersalah dan hukuman berupa pidana denda maupun pidana perampasan yang tetap berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut.

C. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di ZEEI Kalimantan Barat

1. Upaya Penyidikan PPNS, TNI AL dan POLRI

Dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal PPNS melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana yang dapat diajukan ke penuntut umum, maka PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Rumusan dari Pasal 73B ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 diatas, secara tegas memberikan kewenangan kepada PPNS Perikanan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana perikanan yang langsung ke penuntut umum artinya dapat dilakukan tanpa koordinasi kepada penyidik Polri. Demikian juga dengan penyidik TNI AL, hingga saat ini masih berkembang suatu opini/pendapat baik dalam masyarakat, pejabat/instansi pemerintah, kalangan praktisi maupun akademisi yang masih meragukan kewenangan Perwira TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana perikanan yang terjadi di laut khususnya di perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen serta zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apalagi penyidik TNI AL tidak termasuk dalam komponen Sistem

Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Terkait dengan analisis tentang perkembangan tindak pidana perikanan sebagaimana telah diuraikan diatas, lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam penegakan hukum termasuk tidak adanya keterpaduan dalam mekanisme kerja antar penyidik tersebut, tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Kondisi seperti ini justru berpotensi menimbulkan konflik antar penegak hukum itu sendiri yang pada gilirannya akan menghambat atau mempersulit proses penegakan hukum terhadap kejahatan illegal fishing itu sendiri. Banyak kalangan menilai bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing sangat lemah atau tidak efektif, walaupun sudah ada lembaga Bakorkamla.

2. Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Para Jaksa yang menangani perkara tindak pidana perikanan sebelum melakukan penuntutan juga melakukan kegiatan pra penuntutan yang berpedoman pada surat No.B-401/E/9/93 perihal Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan tanggal 8 September 1993 dan Pasal 76 ayat 1 s/d 8 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu setiap ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Jaksa yang telah ditunjuk sebagai Penuntut Umum, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik harus memberitahu hasil penelitiannya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Jika hasil penyidikan belum lengkap (P-18), maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi (dengan mempergunakan formulir P-19).

Dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai apabila sebelum waktu 5 (lima) hari Penuntut

Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 5 (lima) hari sudah ada pemberitahuan oleh Penuntut Umum bahwa Penyidikan sudah selesai. Jika Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan telah lengkap (P-21), maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari Penyidik dinyatakan lengkap, maka Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Perikanan.”

Dalam melakukan kegiatan Pra penuntutan sewaktu memberikan petunjuk kepada penyidik jika hasil penyidikan belum lengkap : “bahwa telah terjadi koordinasi dengan baik antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Misalnya Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik apakah surat-surat izin tersangka lengkap/tidak, apakah penggunaan izin yang dimiliki tersangka telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, dilihat juga agar akibat tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan kerusakan lingkungan/tidak, apakah ada penggunaan obat-obat kimia yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan”.

3. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perikanan

Kendala-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Kendala dalam tuntutan pidana
- b. Kendala Penerapan Beberapa Pasal Dalam UU No. 31 Tahun 2004
- c. Kendala Penjatuhan Hukuman Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan
- d. Kendala Dalam Mekanisme Penyimpanan dan Eksekusi Barang Bukti
- e. Kendala dalam upaya hukum

D. Kebijakan Penegak Hukum Dalam Mengatasi Warga Negara Asing Yang Melakukan Penangkapan Ikan Di ZEEI Kalimantan Barat

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu produk perundang-undangan.

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari perundang-undangan kemungkinan ada tiga hal yaitu :

- a. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam UU mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsirannya.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, ada beberapa Pasal yang terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu:

- a. Seperti Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan Pasal 101 ini, harus diubah;
- b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Sementara dilihat dari pelaku penangkapan ikan di ZEEI Kalbar, mayoritas adalah warga negara vietnam yang hingga saat penelitian ini dilakukan belum ada MoU dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perikanan.

- c. Begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundang-undangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

Dari uraian yang penulis utarakan diatas, kebijakan pimpinan di Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, agar perkara tindak pidana perikanan rencana tuntutananya (rentut) disampaikan ke Kejaksaan Agung, ternyata membuat penanganan perkara menjadi kurang efisien. Apalagi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan hanya dibatasi waktu 30 hari. Dan walaupun kebijakan menyampaikan rentut tersebut akan tetap dipakai hendaknya dibuat suatu sistem yang efisien.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kendala lain yang penulis uraikan berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu mengenai penyimpanan barang bukti berupa kapal. Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki sarana untuk menyimpan kapal tersebut, akhirnya kapal dititipkan pada pihak angkatan laut dipelabuhan. Dan penitipan kapal tersebut tentu saja memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit agar kapal tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga dapat bermanfaat jika di lelang;

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum melalui pendapat mereka tentang hukum. Jika mereka tidak menyadari bahwa ketidakpatuhan atas hukum mempengaruhi kehidupannya, ketidakpatuhannya itu terjadi terus. Sebaliknya masyarakat dapat pula bereaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan sesama mereka Masyarakat

Indonesia, masih kurang tingkat kesadarannya mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam. Mereka senantiasa menganggap bahwa ikan-ikan di laut tidak akan pernah habis.

5. Faktor kebudayaan.

bahwa masyarakat masih kurang kesadarannya terhadap pelestarian alam, kurangnya kesadaran untuk melestarikan alam ini merupakan sesuatu hal yang diyakini oleh masyarakat sehingga terinternalisasi kedalam diri masyarakat tersebut. Untuk itulah perlu kiranya, mengubah pendapat yang diyakini oleh masyarakat ini agar dapat berubah menjadi budaya yang mencintai lingkungan serta mempunyai kesadaran tinggi untuk melestarikan kekayaan alamnya dan menjaganya dari gangguan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari orang asing.

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Bahwa jenis penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan nelayan asing di ZEEI Kalbar adalah berupa ketidaklengkapan dokumen perizinan (SIUP, SIPI, dan *fishing ground*), pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, dan tidak mengaktifkan alat komunikasi (*transmitter*). Dari hasil patroli SPSDKP Pontianak, jumlah kapal asing yang ditangkap melakukan kegiatan *illegal fishing* pada tahun 2011 sampai 2012 sebanyak 55 kapal, terdiri dari 55 nakhoda dan ABK sebanyak 424 orang.
- 2) Bahwa kasus-kasus penangkapan ikan di ZEEI Kalbar yang dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, penulis mengambil 7 sampel putusan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a) 4 (empat) putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2011 dalam persidangan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam dan 3 (tiga) putusan kemudian pada tahun 2012 dengan terdakwa Warga Negara

Thailand. Dalam 4 (empat) putusan tersebut, terungkap bahwa musyawarah Majelis Hakim mencapai hasil pemufakatan bulat tanpa ada perbedaan pendapat antara Majelis Hakim. Dalam putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, mengingat Negara Republik Indonesia belum melakukan perjanjian bilateral dengan Negara Vietnam dan konsekuensi hukum atas diratifikasinya *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 yang dijelaskan dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* tentang hukum laut, dengan tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian bilateral sebaliknya antara negara-negara bersangkutan. Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap semua putusan dengan terdakwa Warga Negara Vietnam yaitu Pidana denda sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dan pidana perampasan yang dijelaskan pada Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

- b) Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana denda dan pidana perampasan terhadap 3 (tiga) putusan dengan terdakwa Warga Negara Thailand yaitu Pidana denda sebesar Rp. 400.000.00,- (*empat ratus juta rupiah*) dan pidana perampasan atas uang hasil lelang kapal penangkap ikan yang dijelaskan pada Pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yaitu bahwa benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang

dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

- 3) Bahwa dalam penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI Kalbar, dihadapkan dengan kendala-kendala sebagai berikut :
 - 1) Kendala dalam tuntutan pidana.
 - 2) Kendala penerapan pasal-pasal ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 Dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan dalam Pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa “Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”.
 - 3) Kendala penjatuhan hukuman terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan.
 - 4) Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti.
 - 5) Kendala dalam upaya hukum.
- 4) Bahwa dalam upaya melakukan penegakan hukum untuk mengatasi Warga Negara Asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI Kalimantan Barat, maka pencegahan merupakan proses mencegah terjadinya kasus pelanggaran *illegal fishing*. Instansi yang berwenang telah membuat program-program kerja yang akan dilakukan SPSDKP Pontianak yaitu :
 - 1) melaksanakan penerapan Surat Laik Operasi (SLO) kapal,
 - 2) melaksanakan pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan,

- 3) melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan,
- 4) melaksanakan pemeriksaan alat bantu penangkapan ikan,
- 5) optimalisasi implementasi MCS (*Monitoring, Controlling, Surveillance*) dalam pengawasan dengan cara peningkatan sarana dan prasarana pengawasan,
- 6) melaksanakan Pendataan Sumberdaya Kelautan (SDK).

b. Saran

1. Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disamping melemahkan penegakan hukum juga dalam jangka panjang berdampak pada kerugian negara yang lebih besar, karena ia hanya dikenakan hukuman denda yang jumlahnya relatif kecil dan tanpa hukuman badan. Oleh karenanya Pasal 102 tersebut harus dicabut karena banyak dijadikan modus operandi oleh nelayan asing dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEI, dan sarat dengan kepentingan dikalangan instansi yang berhubungan dengan bidang perikanan. Hal ini terlihat dari masih diberlakukannya pasal-pasal tertentu di UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan meskipun sudah ada peraturan yang baru.
2. Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di Indonesia, pemerintah hendaknya membentuk forum koordinasi penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah penegakan hukum, sehingga dalam melakukan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh komponen penegak hukum di laut selain itu juga melibatkan masyarakat khususnya masyarakat nelayan melalui Siswasmas.
3. Perlunya system pemerintahan Negara dilaut/maritime, pendirian lembaga Penjaga Laut dan Pantai Nasional, penetapan otoritas Nasional dan otoritas Lokal yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan maritime, keamanan kapal dan

fasilitas pelabuhan, sebagaimana yang dimaksud Konvensi Internasional tentang SOLAS 1974/ISPS Code 2002 dalam rangka mengantisipasi aturan-aturan kemaritiman/konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang sampai saat sekarang ini belum di adopsi kedalam Undang-Undang Maritim Nasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrianus Meliala, 2009, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang.
- Diantha Made Pasek. 2002. *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Mandar Maju; Bandung.
- Erni Widhayant, 1988, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- G. W. Bawengan, 1989, *Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadimulyo, 1997, Mempertimbangkan ADR Kajian alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan, ELSAM, Jakarta.
- Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanya jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni Emerzon, 2008, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pritjanto Heru. 2007. *Hukum laut internasional*. Bayu media publishing; Malang.
- Riduan, 2007, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta.
- Siti Zuiyah, 2006, *Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil Society*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 Februari 2006.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sinar Grafika, 2000, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta

Wignyo Handoko, Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus, 2004

Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Masih Ditakuti, Belum Ditaati*, Edisi 383 Oktober 2006 Warta Bea Cukai.

H Miswan dkk. 2007. *konsep perwakilan di daerah untuk pengamanan laut Seiring implementasi millenium development goals (mdg's)*. Jurnal Sosioteknologi Edisi 11.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

Konvensi UNCLOS 1982

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

ARTIKEL INTERNET :

Andhilala. 2010. Pencurian Ikan di Zee Makin Serius. <http://www.sinarharapan.co.id>. Di akses tanggal 29 April 2010.

strahan.depghan.go.id. Diakses tanggal 12 Maret 2013.

www.alusista.blogspot.com. Diakses tanggal 12 April 2013.

Data dari Badan Riset Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan. (www.dkpri.com)

Kompas, 8 oktober 2012. *30 Kapal Penjarah Ikan Ditangkap, Nelayan Asing Kian Nekat Memasuki Indonesia*.

Illegal Fishing, Teroris Bagi Nelayan. (www.indomaritimeinstitute.org)

<http://dyahutami.blogdetik.com/> diunduh tanggal 6 Maret 2013

<http://mediasinartimur.com/60-kapal-nelayan-asing-ditangkap-dalam-setahun.html>. diunduh tanggal 7 Maret 2013

Kompas, 8 oktober 2012. *30 Kapal Penjarah Ikan Ditangkap, Nelayan Asing Kian Nekat Memasuki Indonesia*. hal 15

Illegal Fishing, Teroris Bagi Nelayan. (www.indomaritimeinstitute.org)